

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PENYANDANG TUNAAKSARA TANPA PENGAMPUAN

ABSTRAK

Oleh Natasya Yadila

Penyandang tunaaksara yang tidak dapat membaca dan menulis menghadapi hambatan dalam memahami isi perjanjian tertulis, namun kondisi ini tidak secara otomatis menjadikan mereka tidak cakap hukum. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum penyandang tunaaksara dalam membuat perjanjian menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang ditandatangani oleh penyandang tunaaksara tanpa pengampuan serta mengidentifikasi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1330, serta mengkaji putusan pengadilan terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh penyandang tunaaksara tanpa pengampuan pada prinsipnya sah karena mereka memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Namun, keabsahan perjanjian bergantung pada terpenuhinya syarat kesepakatan yang bebas (Pasal 1320 angka 1), yang hanya dapat tercapai apabila perjanjian dibacakan dan dijelaskan dengan memadai oleh pihak yang berwenang. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif melalui kewajiban pembacaan akta oleh notaris/PPAT, pendampingan, dan penjelasan konsekuensi hukum, serta secara represif melalui gugatan pembatalan perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat cacat kehendak atau pelanggaran itikad baik. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan khusus mengenai prosedur pembuatan perjanjian yang melibatkan penyandang tunaaksara serta peningkatan kepatuhan notaris dan PPAT terhadap kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Tunaaksara, Keabsahan Perjanjian, Kecakapan Hukum, Pengampuan, Perlindungan Hukum.

A JURIDICAL REVIEW ON THE VALIDITY OF AGREEMENTS SIGNED BY ILLITERATE PERSONS WITHOUT GUARDIANSHIP

ABSTRACT

By Natasya Yadila

Illiterate persons who cannot read and write face obstacles in understanding the contents of written agreements, however, this condition does not automatically render them legally incompetent. The ambiguity regarding the legal status of illiterate persons in entering into agreements creates legal uncertainty and potentially undermines the protection of their rights. This research aims to analyze the validity of agreements signed by illiterate persons without guardianship and to identify legal protections that can be provided to them. This research employs a juridical method with a statute approach, analyzing provisions of the Civil Code, particularly Articles 1320 and 1330, as well as examining relevant court decisions. Data were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that agreements signed by illiterate persons without guardianship are valid in principle because they meet the legal competence requirements as stipulated in Article 1330 of the Civil Code. However, substantive validity depends on the fulfillment of the requirement of free consent (Article 1320 paragraph 1), which can only be achieved if the agreement is read aloud and adequately explained by authorized parties. Legal protection can be provided preventively through the obligation of notaries and Land Deed Officials (PPAT) to read the deed, provide assistance, and explain the legal consequences of the agreement, as well as repressively through lawsuits for contract annulment and claims based on unlawful acts in cases of defective consent or violations of good faith. This research recommends specific regulations regarding procedures for making agreements involving illiterate persons, as well as enhancing compliance by notaries and Land Deed Officials with their statutory duties as regulated under the Law on Notarial Office.

Keywords: Illiteracy, Validity of Agreement, Legal Competence, Guardianship, Legal Protection.